



Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo

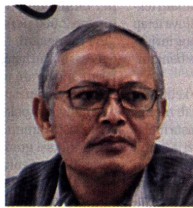
Tak Ingin KLA Hanya Sekadar Predikat, Dorong Pembaharuan Aturan

Kasus kekerasan yang terjadi pada sebuah *daycare* menjadi bukti lemahnya perlindungan terhadap anak di Kota Jogja. Sadar dengan hal tersebut, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo berkomitmen untuk membentuk aturan yang berpihak kepada masyarakat.

CAHYO mengatakan, dalam pembahasan raperda di bawah kepemimpinannya prioritas pembentukan payung hukum dilakukan dengan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Langkah tersebut sebagai landasan substansi raperda yang saat ini disusun benar-benar memfasilitasi keresahan yang dirasakan masyarakat.

Di sisi lain juga sebagai bukti bahwa anggota dewan dari Fraksi PKS tidak hanya sekedar bekerja dari balik meja. Namun benar-benar terjun langsung ke masyarakat. "Melalui inisiatif ini, merupakan bentuk komitmen kuat kami untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat akar rumput," ujar Cahyo, Kamis (21/5).

Menurutnya, di Kota Jogja ada dua permasalahan yang menjadi perhatian serius. Pertama adalah munculnya aksi kejahatan jalanan yang mengarah pada kekerasan terhadap anak. Lalu kedua,



Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak di Kota Jogja benar-benar merasakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang mereka."

CAHYO WIBOWO, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak DPRD Kota Jogja

lemahnya pengawasan tempat penitipan anak atau *daycare* yang membuat puluhan anak menjadi korban kekerasan dan penelantaran.



KOTA LAYAK ANAK:
Bocah bermain di ruang terbuka hijau publik Flamboyan, wilayah Kricak, Kemantren Tegalrejo, Kota Jogja. Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo menegaskan komitmennya mendorong pembaharuan aturan perlindungan anak agar predikat Kota Layak Anak di Kota Jogja tidak sekedar formalitas.

Dalam pembahasan Raperda Kota Layak Anak itu, Cahyo menekankan pentingnya keberanian memperbaharui aturan yang telah usang. Sebab berdasar hasil identifikasinya ada beberapa pasal yang sudah tidak relevan dengan dinamika sosial dan hukum saat ini.

Dia pun menyarankan agar ada penyesuaian sanksi jika kasus kriminalitas dilakukan oleh anak. Misal jika

memungkinkan, anak yang terlibat kejahatan dapat diberikan sanksi pidana sesuai KUHP dan KUHP baru agar dapat memberikan efek jera.

Menurut Cahyo, sanksi pidana juga diusulkan karena dalam penanganan aksi kejahatan jalanan selama ini tidak bisa hanya menggantung aparat kepolisian. Lantaran kasus kriminalitas sering terjadi. "Ini adalah langkah progresif untuk memberikan

perlindungan hukum yang lebih kuat dan modern bagi keluarga di Jogja," tegas anggota Komisi C itu.

Melalui pembahasan Raperda Kota Layak Anak itu, Cahyo dan tim pansus juga berkomitmen agar predikat kota layak anak tidak hanya sekedar formalitas. Melainkan harus ada bukti dengan aksi nyata di lapangan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam proses pembahasan

regulasi itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jogja itu akan memadukan pencegahan kekerasan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Supaya aturan yang dibentuk nantinya tetap memiliki jiwa dan kedekatan dengan budaya masyarakat Jogja. "Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak di Kota Jogja benar-benar merasakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang mereka," tegas Cahyo. (*/inu/prg/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005